



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
LAMPUNG

Jl. Cut Mutiah No.76 Telukbetung Telp.(0721)470209
TELUKBETUNG 35215

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA. 2024 akan melaksanakan 4 (empat) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 20.765.315.687,35- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Tiga Puluh Lima Rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk gaji dan tunjangan PNS. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur di masa mendatang.

Bandar Lampung, Maret 2024
KEPALA DINAS,

BAMBANG SUMBOGO, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710422 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
 BAB II RENCANA STRATEGIS	 5
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024	5
2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2019-2024	6
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	13
 BAB III PENUTUP.....	 22
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

□	Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	6
□	Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	7
□	Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024	8
□	Tabel 2.4 Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024	9
□	Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	12
□	Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu penjabaran sasaran dan program yang sudah ditetapkan di dalam renstra yang akan dilaksanakan oleh masing –masing SKPD yang tertuang dalam kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun seiring dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada satu tahun berjalan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi sasaran strategis yang terdapat pada organisasi pemerintah daerah, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan maupun target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Target kinerja tahunan ini merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan yang ada di dalam sasaran dan kegiatan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 dan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah.

1.3 Tugas Pokok dan fungsi

Pembangunan suatu daerah akan berhasil apabila didukung oleh bidang transportasi yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan sektor transportasi mengarah pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa serta mendukung

pola distribusi nasional demi terwujudnya pengembangan wilayah, peningkatan hubungan internasional untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (desentralisasi) di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyusunan kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi;
3. Penetapan lokasi, pengesahan rencana bangun dan persetujuan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B;
4. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelenggaraan melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. Penetapan tarif penumpang bus antar Kabupaten/Kota dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada Jaringan Provinsi;
6. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu

lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di Jalan Provinsi;

7. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Provinsi;
8. Penyusunan dan penetapan rencana lalu lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota;
9. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
10. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
11. Pengelolaan pelaksanaan pelabuhan regional lama dan pelabuhan baru yang dikelola Provinsi;
12. Pelayanan administratif.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 -2024

Rencana Strategis memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh yang didalamnya terdapat arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang terdapat di dalam RPJMD Provinsi Lampung sedangkan keterkaitannya dengan sistem keuangan, keberadaan Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dinas Perhubungan mempunyai beberapa keterkaitan dalam menunjang rencana agenda pembangunan daerah seperti:

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan;
2. Tujuan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan;
3. Sasaran indikator Dinas Perhubungan.

Berikut ini adalah tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 seperti yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang digunakan sebagai acuan untuk mendukung misi ke-4 Gubernur Lampung, yaitu mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Misi ke-4 Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menjadi wewenang Provinsi	Rasio Konektivitas	100	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	0.72 (Rasio)
				Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi	85 (Nilai)
				Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	40% (Persentase)

2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2019-2024

Secara umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis Perangkat Daerah. Jumlah yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran, yaitu terwujudnya konektivitas Provinsi, meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dan meningkatnya keselamatan transportasi dengan 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

1. Rasio Konektivitas Provinsi;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi;
3. Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala/pengukuran nilai dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja

Utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung Tahun
2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target IKK Kementerian Perhubungan RI
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0.72	0.69	96,38%	0.72
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi	Nilai	85	87.15	102,52%	88,4
3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase	40%	47,15%	118,62%	• Penetapan target disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Realisasi capaian kinerja pada indikator Rasio Konektivitas Provinsi dengan rasio sebesar 0.69 berdasarkan Indikator Kinerja Hasil (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023;
2. Realisasi capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi dengan nilai sebesar 87.15 berdasarkan Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023;
3. Realisasi capaian kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi

teknis dengan pesentase sebesar 47.15 % berdasarkan Indikator Kinerja Hasil (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan kajian Survei Investigasi Desain (SID) Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan.

4. Perincian angka rata-rata capaian indikator kinerja utama sebesar 106 % dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Adapun analisa pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan perbandingan target Renstra 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024	IKK Kementerian Perhubungan RI Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Target
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0.69	0.68	98.55	0,70	0,68	97,14	0.72	0.69	96.38	0.73	0.72
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84	83,34	99,21	85	87.15	102.52	85	87,15	102.52	86	84
3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	30%	29%	96.66	35%	33%	94,29	40%	47.15%	118.62	45%	-

Berdasarkan data tersebut di atas, maka analisa pencapaian IKU, yaitu sebagai berikut:

1. Pada sasaran terwujudnya konektivitas Provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu rasio konektivitas Provinsi dengan capaian kinerja nyata sebesar 0.69 dari target capaian 0.72 dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 96,38%. Untuk capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya (Tahun 2022), maka persentase capaian kinerjanya yaitu sebesar 97,14%.
2. Pada sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi dengan capaian kinerja nyata sebesar 87,15 dari target capaian 85 dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 102,52%. Untuk capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Tahun 2022, maka capaian kinerjanya mencapai 87,15 %.
3. Pada sasaran meningkatnya keselamatan transportasi terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis dengan capaian kinerja nyata sebesar 47,15 % dari target capaian 40% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 118,62%. Untuk capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaian kinerjanya mencapai 94,29 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	P-APBD	24.856.845.310,-	22.251.240.550,-	89,52

Berdasarkan data di atas, bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 guna mencapai target kinerja yang ingin dicapai telah dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.856.845.310,- yang merupakan pagu belanja langsung dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 22.251.240.550,- (89,52%) dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.605.818.759,95.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan Misi Gubernur Lampung (misi ke-4), yaitu mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan efesiensi produksi dan konektivitas wilayah, maka melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	0.73	Rasio
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi	86	Nilai
Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	4%	Persentase

Berdasarkan data di atas, maka target capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor: 800.05/039.a/V.13/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Terdapat beberapa Program dan kegiatan ditahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 17,260,315,687.35,-.
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp. 3,050,000,000.00,-.
- 3) Program Pengelolaan Pelayarandengan anggaran sebesar Rp. 408.980.402,95,-.
- 4) Program Pengelolaan Perkeretaapian anggaran sebesar Rp. 30,000,000.00,-.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 20 (dua puluh) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 451,788,000,- dengan sub kegiatan :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.339.778.000,-.
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00,-.
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 11,943,019,584.40 dengan Sub Kegiatan :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp. 11.883.019.584,40.
 - 2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

2.3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 10,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 484,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya anggaran sebesar Rp. 153.000.000,-.

4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sebesar Rp. 181.000.000,-.

4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.810,000,000,-dengan Sub Kegiatan :

5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-.

5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.

5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-.

5.4 Penyediaan Bahan/Material anggaran sebesar Rp. 98.000.000,-.

5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-.

5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.330,400,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp. 127.400.000,-.
 - 6.2 Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - 6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp. 123.000.000,-.
 - 6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 2.679.108.102,95 dengan Sub Kegiatan:
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-.
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp. 330.000.000,-.
 - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp. 2.337.108.102,95.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 552,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-.
 - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp. 392.000.000,-.
 - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-.

8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 470,000,000,- dengan Sub Kegiatan :

9.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 420.000.000,-.

9.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 1,000,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

10.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-.

10.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B anggaran sebesarRp. 445,000,000,- dengan Sub Kegiatan :

11.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.

11.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B anggaran sebesar Rp. 345.000.000,-.

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesarRp.185,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

12.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

12.2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

12.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.

12.4 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.

- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan anggaran sebesar Rp. 150,000,000,- dengan Sub Kegiatan :

13.1 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

13.2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

13.3 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesarRp.575,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

14.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

14.2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-.

- Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesarRp.150,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

15.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

16.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.

- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

17.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 325,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

18.1 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-

18.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan
Regional anggaran sebesarRp. 75,000,000,-.

- Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

19.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan diPelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

20.1 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun untuk perencanaan dan penentuan kebijakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada sektor perhubungan di Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis 2019-2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini akan menjadi arah dalam pembangunan baik sarana dan prasarana di sektor perhubungan Tahun 2024.

Penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 diharapkan dapat berjalan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat tercapai sebesar 100%.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi periksa.

Bandar Lampung, Maret 2024

KEPALA DINAS,

BAMBANG SUMBOGO, SE.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710422 199503 1 002

LAMPIRAN

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET T H K E S	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menjadi wewenang Provinsi	Rasio Konektivitas	68%	75%	Persentase	1. Terwujudnya Konektivitas Angkutan Sesual Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	0.72	Rasio	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya pengelolaan pelayaran di Provinsi Lampung	Persentase pengelolaan pelayaran	90	Persentase	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Persentase kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	90	Persentase	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat	12	laporan	50,000,000
														Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Meningkatnya pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Persentase pelabuhan pengumpulan regional yang dikelola	60	Persentase	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Tercapainya kebutuhan Pelabuhan Regional di Provinsi Lampung	Jumlah Pelabuhan Regional di Provinsi Lampung yang dikelola	1	unit	-
																			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah pelabuhan pengumpulan regional yang beroperasi dan terpelihara	1	unit	323,980,402,95
														Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Meningkatnya koordinasi antar mitra Perhubungan dan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Persentase tercapainya koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada transportasi laut termasuk sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	100	Persentase	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Terlaksananya Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional (Forum Kepelabuhanan)	2	Laporan	35,000,000
									Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya pengelolaan perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	Persentase	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Meningkatnya Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api	Persentase koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api	100	Persentase	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api)	2	dokumen	30,000,000
									Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	Persentase	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kajian LLAJ Provinsi	Persentase kajian Jaringan LLAJ Provinsi	100	Persentase	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen kajian Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen	650,000,000

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
																			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi kajian Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen	50,000,000					
																			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Meningkatnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	100	Persentase	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Terminal Tipe B	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	unit	50,000,000
																			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Honor Operasional Terminal)	11	orang	210,000,000					
																			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pengembangan pelayanan, Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi	Persentase Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi	80	Persentase	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan Dalam Angka dan tersedianya Teknologi sektor pelayanan jasa transportasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (OED sisi Room dinas perhubungan prov.lampung)	1	dokumen	180,000,000
																			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80	Persentase	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya laporan kendaraan yang memiliki dan tidak memiliki izin serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	400	unit	175,000,000
					2.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	85	Nilai	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	Persentase	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100	Persentase	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Pengawasan Perizinan Angkutan Umum)	100	unit	50,000,000					
																			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pengendalian, pengawasan disiplin pengoperasian dan operasional transportasi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi(Periode Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)	4	laporan	550,000,000					

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	40	Persentase	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	80	Persentase	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Meningkatnya Fasilitas perengkapan jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas perengkapan jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	80	Persentase	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Tersedianya Fasilitas Perengkapan jalan di jalan Provinsi Tersedianya Fasilitas LLAJ yang Terehabilitasi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	200	unit	1,100.000,000	
														Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terciptanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang baik	Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	Persentase	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Tersedianya Dokumen Desain Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksananya pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi (Pengendalian ODOL) Terlaksananya Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan Angkutan jalan (Forum LLAJ)	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Laporan pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi (Pengendalian ODOL) Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 40 6 2	laporan unit laporan Laporan	25,000,000 50,000,000 70,000,000 30,000,000	
														Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Keselamatan di Jalan Provinsi	Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi	40	Persentase	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Kegiatan Penelitian DRK Terlaksananya Kegiatan Monitoring Terminal Tipe B Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Layanan Pembinaan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Penelitian DRK) Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Monitoring Terminal Tipe B) Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (pembinaan keselamatan Bunda Salut)	2 2 2	laporan laporan laporan	50,000,000 50,000,000 50.000.000	

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH RE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase pelayanan perkantoran yang dilaksanakan	100	Persentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	150,000,000
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKj, LKPI, LPPD)	3	laporan	46,160,000
																			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, Evaluasi Renstra, monitoring)	3	laporan	95,000,000
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persentase	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji PNS dan Tunjangan	Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan	110	OB	12,756,208,644,20
																			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya tersedianya pengelolaan anggaran kantor, material, cek dan pulsa operator	Jumlah bulan pengelolaan anggaran kantor dan ketersediaan material, cek dan pulsa operator	7	dokumen	-
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Akuntansi SKPD dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan	Jumlah bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Akuntansi SKPD dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan	3	dokumen	35,000,000

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen Tanggapan/ Pemeriksaan dengan tertib dan teratur	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Pemeriksaan	3	dokumen	-	
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7	dokumen	-	
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persentase	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Jumlah bulan penatausahaan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	1	laporan	3,000,000	
														Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	-	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	laporan	-	
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN	- Persentase tercapainya kapasitas sumber daya ASN yang berkualitas	100	Persentase	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai Kepegawaian	1	paket	175,000,000	
																			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	bulan	-	
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	bulan	-	
																			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah bulan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	bulan	-	

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	orang	143,000,000
																			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya BIMTEK berupa pemilihan Pelajar Pelopor tingkat Provinsi dan AKUT	Jumlah Peserta Pelajar Pelopor dan AKUT	50	orang	150,000,000
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi umum perangkat daerah	100	Persentase	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan Listrik yang dibutuhkan	Jumlah bulan penyediaan peralatan Listrik yang dibutuhkan	12	paket	12,000,000
																			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	Jumlah bulan penyediaan peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	12	paket	10,000,000
																			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan tersediannya barang cetakan dan pengadaan	12	paket	45,000,000
																			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12	dokumen	5,000,000
																			Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya ATK dan terlaksananya Pameran Pembangunan Lampung Fair	Jumlah bulan Penyediaan ATK dan pelaksanaan Pameran Pembangunan Lampung Fair	12	paket	61,000,000
																			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya jamuan bagi tamu Dinas dan makan minum rapat	Jumlah bulan penyediaan jamuan bagi tamu Dinas dan makan minum rapat	12	dokumen	48,000,000
																			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	117	laporan	900,000,000
																			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	dokumen	-
																			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	dokumen	-

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	80	Persentase	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	1,105,300,000
																			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	paket	10,000,000
																			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	unit	87,000,000
																			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	22,968,000
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12,000,000
																			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	300,000,000
																			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan dan keamanan kantor/ kapal	12	laporan	1,837,450,000
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpelihaaranya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	Persentase	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	2	unit	90,000,000
																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Kapal Bantuan 35 GT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Kapal Bantuan 35 GT yang terpelihara	11	unit	380,000,000
																			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	unit	25,000,000

TUJUAN					SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 5	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	55,000,000

KEPALA DINAS

BAMBANG SUMBOGO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710422 198503 1 002

